
**EVALUASI KESIAPAN PENERAPAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
PADA BANGUNAN PUSAT PERBELANJAAN DI SURAKARTA**

Silvia Yulita Ratih
Program Studi Teknik Sipil Universitas Surakarta
Jl. Raya Palur KM 05 Surakarta

Abstrak

Sesuai dengan amanat PP 36 Tahun 2005, pemerintah mensyaratkan pemberlakuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada tahun 2010 bagi setiap bangunan gedung publik di kota metro dan besar serta diterapkan paling lambat pada tahun 2020 di semua kota sedang dan kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pengelola bangunan pusat perbelanjaan di Surakarta menyambut penerapan SLF dan untuk mengetahui bagaimana kondisi bangunan pusat perbelanjaan Pusat Grosir Solo ditinjau dari penerapan SLF.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Pengambilan data diperoleh dengan cara penyebaran kusioner untuk para pengelola pusat perbelanjaan dan pengguna bangunan pusat perbelanjaan serta survey langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi eksisting bangunan pusat perbelanjaan.

Hasil penelitian menunjukkan para pengelola pusat perbelanjaan siap jika diterapkan sertifikat laik fungsi. Untuk PGS semua syarat proses perijinan untuk mendirikan bangunan sudah dipenuhi dimana didalamnya termasuk syarat-syarat teknis termasuk persyaratan utilitas yaitu pemadam kebakaran, plambing, dan persyaratan teknis yang lain. Sehingga secara keseluruhan kondisi bangunan pusat perbelanjaan Pusat Grosir Solo ditinjau dari kesiapan administrasi dan teknis seperti sudah siap jika diterapkan SLF. Dari *Importance Performance Analysis* di peroleh sebanyak 56,41 % berada pada kuadran I (pertahankan kinerja) ; 7,69% pada kuadran II (cenderung berlebihan); 33,3% pada kuadran III (prioritas rendah) dan 2,6% pada kuadran IV(tingkatkan kinerja). Penerapan SLF yang tinggi yang dirasakan oleh pengguna berada pada kuadran I dan II . Di kuadran III dan IV penerapannya masih rendah. Untuk komponen yang terletak di kuadran I sudah sesuai antara penerapan dan kepentingan. Berarti hanya perlu dilakukan pemeliharaan rutin dan jika ada yang rusak perlu perbaikan pada komponen tersebut. Untuk kuadran II penerapannya rendah padahal kepentingan tinggi sehingga perlu perhatian dari pengelola untuk menambah atau melengkapi fasilitas yang sudah ada menjadi lebih baik. Untuk kuadran III antara penerapan dan kepentingan sama-sama rendah atau sudah sesuai sehingga tidak perlu perhatian lebih. Untuk di kuadran IV penerapannya tinggi padahal kepentingan rendah sehingga pengelola hanya perlu melakukan pemeliharaan supaya kondisinya tetap baik dan tidak perlu menambah atau memperbaiki fasilitas yang ada.

Kata Kunci : Sertifikat Laik Fungsi, Pusat Perbelanjaan.

PENDAHULUAN

Kota Surakarta yang memiliki luas wilayah 44,04 Km² adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang berkembang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gedung-gedung baru yang dibangun baik di pusat kota maupun pinggir kota baik bangunan berskala kecil maupun skala besar. Misalnya

pembangunan pusat-pusat perbelanjaan seperti Solo Grand Mal dan Solo Square, pembangunan apartemen seperti apartemen Paragon. Ada pembangunan rusunawa sebagai alternatif pemukiman untuk penduduk karena semakin mahal dan terbatasnya lahan. Selain itu juga ada alih fungsi bangunan lama untuk fungsi yang

baru. Seperti bangunan bank menjadi beralih fungsi menjadi hotel. Hal ini tentunya jika tidak diatur tentu akan menimbulkan masalah baru.

Banyaknya pembangunan yang kurang terpadu, terarah, terencana tidak hanya akan menyebabkan ketidakteraturan pada lingkungan juga akan menimbulkan banyak timbul masalah di masa yang akan datang. Seperti terjadinya penggusuran, kemunduran tampilan bangunan yang terlihat tidak teratur dan menarik selain itu akan berdampak pada lingkungan sekitar.

Adanya kecenderungan pembangunan yang tidak teratur dan tidak terkoordinasi sebenarnya menjadikan satu permasalahan tersendiri bagi kota Surakarta. Masih banyak bangunan di kota Surakarta yang belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal tersebut mengindikasikan masyarakat telah membangun sementara IMB belum keluar. Bahkan ada juga bangunan yang dibangun tanpa IMB. Ketidakhahaman masyarakat tentang tujuan dari IMB dan kurangnya sosialisasi tentang IMB juga menjadi penyebab banyak orang yang tidak mengurus IMB.

Penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan andal. Untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung yang andal harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif bangunan gedung sesuai dengan fungsinya maka diperlukan adanya suatu pernyataan bahwa bangunan gedung tersebut memang sudah layak untuk digunakan sesuai dengan fungsinya dalam bentuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung. Beda antara IMB dan SLF, IMB adalah untuk kontrol bangunan gedung pada saat bangunan didirikan, SLF berfungsi sebagai kontrol saat pemanfaatan bangunan gedung.

SLF ini bukan sebuah proses yang benar-benar baru dan berdiri sendiri, namun merupakan serangkaian proses yang sudah diawali sejak pembuatan IMB dengan studi kelayakan lingkungan maupun perencanaan bangunan gedung itu sendiri. Setelah pembangunan gedung selesai dilaksanakan, sebelum bangunan dimanfaatkan pemilik bangunan/pemegang IMB harus mengurus

SLF kepada pemerintah daerah setempat dengan serangkaian proses pemeriksaan bangunan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bakal menerapkan sertifikasi laik fungsi bagi sejumlah bangunan publik di Kota Surakarta, pascapenetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bangunan menjadi Perda. Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Solo bakal melakukan pendataan terhadap sejumlah gedung publik di Solo, seperti pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit dan fasilitas gedung publik lainnya untuk menentukan gedung tersebut layak mendapatkan sertifikat laik fungsi atau tidak. Dalam penerapan Raperda Bangunan menggunakan dasar UU Nomor 28/2006 tentang Bangunan. Dalam UU tersebut menyebutkan adanya sertifikasi laik fungsi dalam penataan bangunan kota.

Sesuai dengan PP 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung, maka Pemerintah mensyaratkan pemberlakuan sertifikat laik fungsi (SLF) pada tahun 2010 bagi setiap bangunan gedung publik di kota metro dan besar dan bahkan SLF tersebut sudah harus diterapkan paling lambat pada tahun 2020 untuk semua kota sedang dan kecil.

Dengan pemberlakuan SLF terhadap bangunan publik akan memberikan nilai positif yang signifikan menyangkut keandalan bangunan yang meliputi aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan dan keselamatan bangunan bagi para pengguna gedung. Hal tersebut mengingat kondisi bangunan gedung masih ada yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sehingga aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan dan keselamatan juga masih yang belum terpenuhi.

Salah satu bangunan publik yang menjadi objek pemberlakuan SLF adalah pusat perbelanjaan. Di Surakarta terdapat bangunan pusat-pusat perbelanjaan yang nantinya akan diperiksa apakah layak atau tidak mendapatkan SLF. Selain itu para pemilik atau pengelola bangunan sendiri juga masih banyak yang belum mengetahui perlunya bangunan yang dikelolanya mempunyai SLF. Untuk itu perlu dilakukan pengamatan bagaimana kesiapan pengelola bangunan pusat perbelanjaan menyambut penerapan SLF dan bagaimana kondisi bangunan pusat

perbelanjaan ditinjau dari penerapan SLF di Surakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pengelola pusat perbelanjaan dalam rangka penerapan SLF di Surakarta dan meninjau bagaimana kondisi bangunan pusat perbelanjaan ditinjau dari SLF.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif untuk mendapatkan hasil ataupun data-data yang akan menegaskan hubungan antara variabel-variabel yang diselidiki. Metode ini dapat dilaksanakan di dalam laboratorium ataupun di luar laboratorium. Dalam penelitian ini dilaksanakan di luar laboratorium.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuisioner yang ditujukan kepada responden yaitu pengelola pusat perbelanjaan di Surakarta dan para pengguna yaitu para penyewa bangunan pusat perbelanjaan PGS. Data yang dipakai adalah data ordinal yaitu penskalaan sikap individu terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu juga melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengamatan langsung Pusat Grosir Solo untuk mengetahui kondisi eksisting bangunan yang sebenarnya untuk melengkapi daftar simak dari SLF.

Untuk data statistik pengambilan sampel yang digunakan menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu *Purposive Sampling* dengan responden pengelola pusat perbelanjaan dan pengguna bangunan Pusat Grosir Solo. Untuk mengukur validitas dalam penelitian ini dengan memakai *Product Moment Correlation*.

Validitas adalah seberapa alat dapat mengukur hal atau subjek yang ingin diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah kuisioner yang berisi beberapa pertanyaan untuk mengukur suatu hal dikatakan valid jika setiap butir pertanyaan yang menyusun kuisioner tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi.

Adapun rumusannya adalah:

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\left\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\right\}\left\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\right\}}} \quad (2.14)$$

dengan :

- r : koefisien korelasi,
- Y : Variabel terikat
- Xi : elemen variabel bebas
- n : jumlah data

Reliabilitas artinya mempunyai sifat dapat dipercaya. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas baik apabila dipergunakan berkali-kali oleh peneliti lain tetap memberikan hasil yang sama. Reliabilitas adalah seberapa jauh konsistensi alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dalam mengukur hal dan subjek yang sama.

Adapun rumusannya sebagai berikut :

$$r_n = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum ab^2}{\alpha^2} \right)$$

dengan:

- r_n : Reliabilitas instrumen
- k : Banyaknya butir pertanyaan
- $\sum ab^2$: Jumlah varian butir
- α^2 : **Varian total**

Dalam penelitian ini syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat validitas adalah jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan apabila semua hasil korelasi antara masing-masing butir dengan butir totalnya memiliki nilai signifikan dibawah 0,05. Untuk mengukur reliabilitas dilakukan uji reliabilitas dengan metode *Alpha Cronbach*.

Setelah uji validitas dan reliabilitas terpenuhi dihitung rata-rata masing-masing butir pertanyaan agar dapat diketahui tingkat kesiapannya dalam menghadapi penerapan SLF. Sedang untuk hasil kuisioner dari pengguna Pusat Grosir Solo dianalisa dengan metode IPA (*Important-Performance Analysis*) untuk mengetahui letak-letak masing-masing butir pertanyaan sehingga diketahui tingkat penerapan dan tingkat kepentingannya.

Analisis IPA memiliki dua variabel yaitu variabel *Performance* yang digambarkan pada Sumbu X dan variabel *Importance* yang digambarkan pada Sumbu Y.

Untuk keperluan ini ada dua buah variabel yang menentukan tingkat kinerja dengan simbol X dan tingkat kepentingan dengan simbol Y sebagaimana dijelaskan dengan model matematik sebagai berikut:

$$Tk = \frac{X}{Y} \times 100 \%$$

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{N}$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y}{N}$$

Dengan :

Tk = Tingkat kesesuaian responden

X = Skor penilaian pelaksanaan kinerja

Y = Skor penilaian kepentingan

\bar{X} = Skor rata-rata tingkat kepuasan/kinerja

\bar{Y} = Skor rata-rata tingkat kepentingan

N = Jumlah responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesiapan Pengelola Pusat Perbelanjaan

Dari hasil survey pengelola pusat perbelanjaan menyatakan siap jika SLF diterapkan untuk semua variabel. Hal ini dapat terjadi karena sebelum mendirikan sebuah pusat perbelanjaan, pemilik atau pengelola harus mengajukan ijin untuk mendirikan bangunan kepada pemerintah kota Surakarta terlebih dahulu. Pengajuan ijin tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan seperti data kepemilikan hak atas tanah, ijin pemanfaatan tanah, bukti kejelasan kepemilikan gedung.

Selain hal tersebut pengajuan juga dilampiri dengan gambar-gambar teknis pendukung seperti gambar denah, utilitas, *mekanikal elektrik*, sumur resapan dan lain-lain. Jika dari data-data tersebut ada yang kurang atau tidak sesuai, ijin untuk mendirikan bangunan tidak akan diproses sebelum data yang kurang atau tidak sesuai tersebut dilengkapi. Selain itu setelah bangunan berdiri ada peninjauan secara rutin dari pemerintah daerah. Salah satunya inspeksi alat-alat pemadam kebakaran. Karena hal itulah sangat wajar jika pengelola pusat perbelanjaan menyatakan siap jika akan diterapkan SLF

2. Kesiapan Pusat Perbelanjaan PGS

Persyaratan teknis yang meliputi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan. Persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

Untuk persyaratan teknis meliputi dokumen pelaksanaan konstruksi bangunan termasuk *as built drawing*, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan bangunan, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrik (manual) dan dokumen ikatan kerja PGS mempunyai semua persyaratan yang diperlukan untuk syarat penerbitan SLF. Untuk persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perda kota Surakarta No 8 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung.

Tabel 1 Kondisi kesiapan administrasi dan teknis PGS

No	Uraian	Ad a	Kondisi
1.	Persyaratan administratif		
1.a	Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah	√	Sesuai ketentuan
1.b	Status kepemilikan bangunan gedung	√	Sesuai ketentuan
1.c	Izin mendirikan bangunan No. 601/720/X/04 tanggal 19 Oktober 2004		Sesuai Ketentuan
2	Persyaratan Teknis		
	<i>As built drawing</i>	√	Baik
	Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan bangunan gedung	√	Baik
	Dokumen ikatan kerja No & Tgl SPK : 010/PGS/SPK-Kontrak/XII/2004, 17 Desember 2004 No Kontrak : 005/PGS/SPK-Kontrak/XII/2004	√	Sesuai ketentuan
2.a	Persyaratan tata bangunan		
	a. persyaratan peruntukan	√	
	Memenuhi ketentuan dalam rencana tata ruang kabupaten/kota tentang jenis fungsi atau kombinasi fungsi bangunan gedung yang boleh dibangun pada suatu persil/kavling/blok peruntukan tertentu	√	Sesuai ketentuan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung
	b. Intensitas bangunan gedung		
	koefisien dasar bangunan (KDB)	√	Sesuai ketentuan
	koefisien lantai bangunan (KLB)	√	Sesuai ketentuan
	Koefisien Daerah Hijau (KDH)	√	Sesuai ketentuan
	Garis Sepadan Bangunan (GSB)	√	Sesuai ketentuan
2.b	Arsitektur bangunan		
	a. persyaratan penampilan bangunan gedung	√	Sesuai ketentuan
	b. tata ruang	√	Sesuai ketentuan
	a. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya	√	Sesuai ketentuan
	b. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur	√	Sesuai ketentuan
2.c	Persyaratan pengendalian dampak lingkungan		
	persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan Bangunan	√	Sesuai ketentuan

Sumber: Hasil survey lapangan

Bangunan pusat perbelanjaan PGS termasuk bangunan yang masih baru. Semua syarat proses perijinan untuk mendirikan bangunan sudah dipenuhi dimana didalamnya termasuk syarat-syarat teknis termasuk persyaratan utilitas yaitu

pemadam kebakaran, plambing, dan persyaratan teknis yang lain. Sehingga secara keseluruhan kondisi bangunan pusat perbelanjaan Pusat Grosir Solo ditinjau dari kesiapan administrasi dan teknis seperti sudah siap jika diterapkan SLF

Untuk persyaratan arsitektur meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat sudah memenuhi ketentuan sesuai ketentuan Perda kota Surakarta No 8 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung.

Untuk pengendalian dampak lingkungan, persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan bangunan. Untuk diketahui bahwa penetapan bangunan - bangunan dan kawasan kuno bersejarah di kotamadya daerah tingkat 2 Surakarta yang dilindungi UU no. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tanggal 31 september 1997 disebutkan bahwa PGS termasuk dalam kawasan perdagangan dan jasa walaupun disekitarnya masih terdapat kawasan cagar budaya.

Pemerintah kota juga telah mengkaji analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) terkait pembangunan dikawasan sekitar Benteng Vastenburg. Secara umum konsep penataan di kawasan Benteng Vastenburg ditetapkan sebagai *central business district* (CBD). Pembangunan pusat perdagangan bisa dilakukan sepanjang mempertahankan cagar budaya disekitar tempat tersebut.

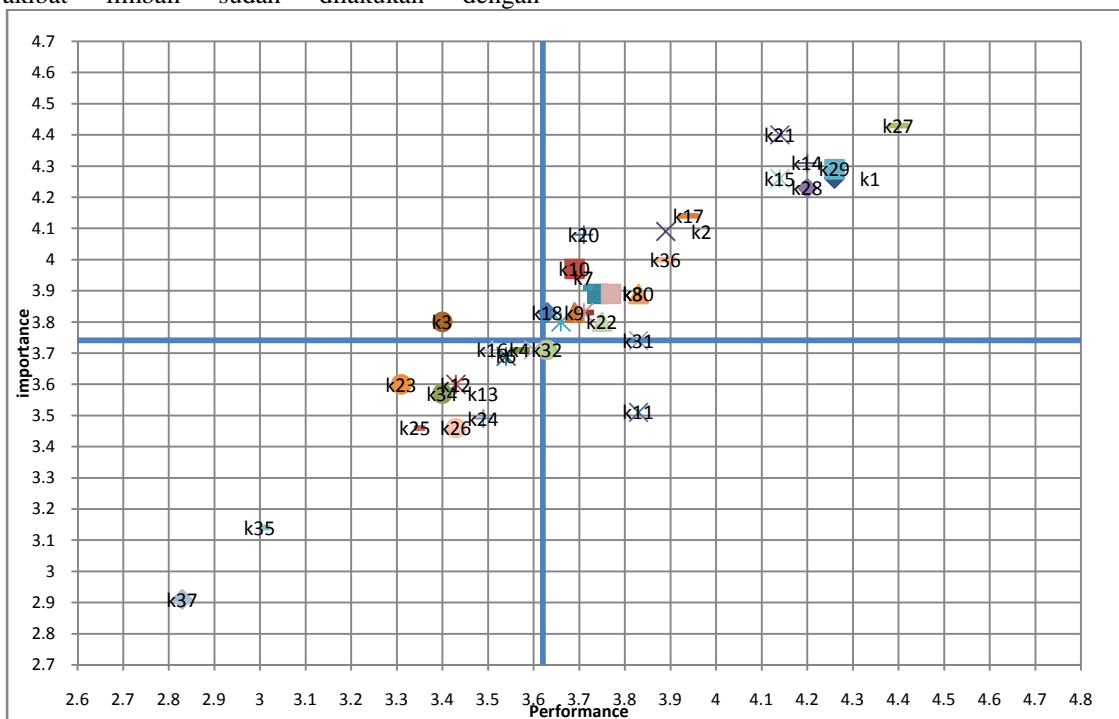
Untuk pengendalian dampak lingkungan lainnya akibat limbah sudah dilakukan dengan

pengelolaan limbah (pada sistem utilitas) sebelum dibuang ke saluran kota. Sistem pembuangan air buangan termasukke dalam sistem instalasi untuk mengalirkan air buangan yang berasal dari peralatan saniter maupun hasil buangan dapur. Sebelum air buangan dari peralatan saniter maupun dari buangan dapur dibuang ke saluran umum / kota maka dilakukan pengolahan terlebih dahulu, sehingga memenuhi ambang baku yang dipersyaratkan baru setelah itu baru dibuang ke saluran kota.

3. Kesiapan PGS Untuk Penerapan SLF

Sumbu X merupakan tingkat penerapan yang dirasakan oleh para pengguna bangunan Pusat Grosir Solo yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Sumbu Y adalah tingkat kepentingan yang diinginkan para pengguna bangunan yang seharusnya berusaha dipenuhi oleh pengelola Pusat Grosir Solo dalam mewujudkan kondisi bangunan yang memenuhi syarat keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Hasil perhitungan ditampilkan dalam diagram analisis IPA. Pada diagram ini garis pemisah antar kuadran diletakkan pada nilai rata-rata skala sumbu pengukuran tingkat penerapan dan rata-rata skala sumbu pengukuran tingkat kepentingan seperti terlihat pada Gambar 3.1



Gambar 1. Analisa IPA

Berdasarkan grafik IPA maka faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat penerapan SLF dikelompokkan pada masing-masing kuadran sebagai berikut :

a. Kuadran I : Penerapan tinggi, kepentingan tinggi

Butir K1 : Struktur bangunan kuat, kaku dan stabil untuk mendukung semua beban

Butir K2 : Tidak ada kerusakan pada struktur

Butir K7: Instalasi air bersih yang memenuhi standard dan ketentuan teknis yang berlaku

Butir K8 : Penyediaan air bersih yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengguna

Butir K9: Penyediaan system sanitasi yang memadai dan mudah dioperasikan selalu dipelihara dan dirawat

Butir K10: Saluran air hujan

Butir K14: Tempat pembuangan sampah

Butir K15: Penyediaan ventilasi alami yang memenuhi kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara dalam ruang

Butir K17: Pencahayaan alami yang optimal

Butir K18: Penyediaan pencahayaan buatan

Butir K19: Pencahayaan khusus (genset)

Butir K20: Pengaturan ukuran ruangan dan tata letak

Butir K21: Tata letak dan sirkulasi antar ruang

Butir K22: Pengaturan temperatur dan kelembaban

Butir K27 : Penyediaan pintu masuk yang memadai

Butir K28: Penyediaan pintu keluar

Butir K29: Koridor

Butir K30: Tangga/escalator

Butir K33: Ram untuk parkir

Butir K36: Tempat parkir

Butir K40: Toilet

Butir K41: Akses dari bangunan menuju tempat parkir

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran I dianggap sebagai faktor penunjang yang penting dalam kesiapan penerapan SLF. Pengelola PGS berkewajiban mempertahankan prestasi yang telah dicapai

b. Kuadran II : Penerapan tinggi, kepentingan rendah

Butir k11: penyediaan sumur resapan untuk air hujan

Butir K31: Pintu/tangga darurat

Butir K32: Penunjuk arah evakuasi

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran II dianggap tidak terlalu penting sebagai faktor penunjang kesiapan penerapan SLF. Pengelola PGS dapat mengalokasikan sumber daya yang terkait dengan faktor-faktor tersebut kepada faktor-faktor lain yang penanganannya lebih membutuhkan peningkatan.

c. Kuadran III: Penerapan rendah, kepentingan rendah

Butir K4: Instalasi penangkal petir untuk mencegah dan mengurangi resiko bangunan terkena sambaran petir

Butir K6: Bahan bangunan yang aman buat kesehatan dan lingkungan

Butir K12: Saluran pembuangan air kotor

Butir K13: Resapan air kotor

Butir K16: Penyediaan ventilasi buatan

Butir K23: Pengguna tidak terganggu kegiatan dilingkungan sekitarnya

Butir K24: Pengguna tidak mengganggu bangunan sekitarnya

Butir K25: Tidak terganggu getaran/kebisingan

Butir K26: Kegiatan pengguna tidak menimbulkan getaran/kebisingan

Butir K34: Lift

Butir K35: Fasilitas khusus untuk penyandang cacat dan lansia

Butir K37: Ruang ibadah

Butir K43: Fasilitas komunikasi dan informasi

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran III dianggap tidak terlalu penting sebagai faktor penunjang kesiapan penerapan SLF. Pengelola PGS tidak perlu memprioritaskan lebih pada faktor-faktor yang terletak di kuadran ini.

d. Kuadran IV: Penerapan rendah, kepentingan tinggi

Butir K3: Instalasi pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran
Faktor yang terletak pada kuadran IV dianggap sebagai faktor yang penting dalam penunjang kesiapan penerapan SLF namun kondisi saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Pengelola berkewajiban meningkatkan kinerja faktor yang terletak pada kuadran tersebut.

Diketahui sebanyak 56,41% berada pada kuadran I (pertahankan kinerja), 7,69 % berada pada kuadran II (cenderung berlebihan). 33,3% berada pada kuadran III (prioritas rendah) dan 2,6% pada kuadran IV (tingkatkan kinerja). Jadi penerapan yang dirasakan oleh pengguna sebanyak 64,1% adalah penjumlahan butir pertanyaan dari kuadran I dan II. Dari keempat kuadran, untuk kuadran I dan III tidak ada permasalahan karena antara penerapan dan kepentingan adalah sama yaitu kuadran I sama-sama tinggi dan kuadran III sama-sama rendah. Kuadran II dan IV ada perbedaan antara tingkat kepentingan dan penerapan.

Untuk komponen yang terletak di kuadran I sudah sesuai antara penerapan dan kepentingan. Berarti hanya perlu dilakukan pemeliharaan rutin dan jika ada yang rusak perlu perbaikan pada komponen tersebut.

Untuk kuadran II penerapannya rendah padahal kepentingan tinggi sehingga perlu perhatian dari pengelola untuk menambah atau melengkapi fasilitas yang sudah ada menjadi lebih baik.

Untuk kuadran III antara penerapan dan kepentingan sama-sama rendah atau sudah sesuai sehingga tidak perlu perhatian lebih.

Untuk di kuadran IV penerapannya tinggi padahal kepentingan rendah sehingga pengelola hanya perlu melakukan pemeliharaan supaya kondisinya tetap baik dan tidak perlu menambah atau memperbaiki fasilitas yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelola pusat perbelanjaan di Surakarta dalam rangka penerapan Sertifikat Laik Fungsi di Surakarta menyatakan siap terutama untuk variabel data administrasi, data teknis dan peruntukan serta intensitas bangunan. Dan cukup siap untuk variabel persyaratan keselamatan, kesehatan, persyaratan kenyamanan dan persyaratan kemudahan. Kesiapan para pengelola ini dikarenakan semua aspek variabel pendukung komponen laik fungsi bangunan pada saat pengajuan izin mendirikan bangunan menjadi salah satu

pertimbangan bahwa izin tersebut diproses atau tidak. Jika IMB sudah keluar berarti semua variabel pendukung data teknis, administrasi, peruntukan dan intensitas bangunan serta variabel persyaratan keandalan bangunan dinilai sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Kondisi bangunan pusat perbelanjaan Pusat Grosir Solo ditinjau dari kesiapan penerapan Sertifikat Laik Fungsi dari analisa IPA penerapan yang dirasakan oleh pengguna sebanyak 64,1% terletak pada kuadran I dan II.
3. Bangunan pusat perbelanjaan Pusat Grosir Solo ditinjau dari kesiapan administrasi dan teknis sudah siap jika diterapkan SLF

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2009, *Peraturan Daerah Kota Surakarta No.08 Tahun 2009 Tentang Bangunan*, Pemerintah Kota Surakarta, Surakarta.
- Anonim, 2008, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan*, Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta.
- Anonim, 2008, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung*, Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta
- Anonim, 2007, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.25/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*, Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Penataan bangunan dan Lingkungan, Jakarta.
- Anonim, 2006, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung*, Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta.
- Anonim, 2005, *Peraturan Pemerintah RI NO. 36 Tahun 2005 Tentang*

- Bangunan Gedung*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Anonim, 2002, *Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*, Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta.
- Augbenhaugh, J.M., Hermann, J.W., 2008, *A Comparison of Statistical Approaches for Assessing Reliability*, International journal of reliability and safety, (2008) Vol 2 No 4 pp 265-285
- Horner, RMW., El-Haram, MA., Munns, AK., 1997, *Building Maintenance Strategy: A New Management Approach*, Journal of Quality in Maintenance Engineering (1997), Vol. 3 Iss: 4, pp.273 - 280
- Iqbal Hasan, 2004, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Irinani, M., 2005, *Kriteria dan Proses Desain Keandalan Bangunan Pusat Perbelanjaan Berkaitan dengan Bahaya Kebakaran*, Tesis, ITB, Bandung.
- Kuswanto, 2009, *Analisis Kinerja Angkutan Umum Kereta Api Dengan Metode Importance Performance Analysis*, Skripsi Jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Lateef, O.A., 2010, *Case for Alternative Approach to Building Maintenance Management of Public Universities*, Journal of Building Appraisal (2010) 5, 201-212.
- Lee H.H.Y. dan David S., 2009. "Overview of Maintenance Strategy, Acceptable Maintenance Standard and Resources From a Building Maintenance Operation Perspective" Journal of Building Appraisal (2009) 4, 269–278
- Levin H., 1997. *Systematic Evaluation and Assessment of Building Environmental Performance (SEABEP)*, Santa Cruz, California, USA. Submitted for presentation at "Buildings and Environment," Paris, June 9-12, 1997
- Riduwan, 2008, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung.
- Rina Febriani, 2008, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengalaman Belanja Yang Menyenangkan Pada Pusat Perbelanjaan, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Santosa, S., 2006. *Menguasai Statistik di Era Informasi dengan SPSS 14*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Singarimbun, M., Effendi, S., 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta.
- Sudarmanto, R. Gunawan, 2005, *Analisis Regresi Linier Ganda Dengan SPSS*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Sugiyono dan Wibowo, 2004, *Statistika untuk Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS 10.0 for Windows*. Cetakan Keempat, Alfabeta, Bandung
- Suharsimi, Arikunto, 2000, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sujianto, Agus Eko, 2009, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Supranto, J., 2001, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Suprpto, 2008, *Tinjauan Eksistensi Standar- Standar (SNI) Proteksi Kebakaran dan Penerapannya Dalam Mendukung Implementasi Peraturan Keselamatan Bangunan*, Prosiding PPIS Bandung, 29 Juli 2008, Bandung.
- Tarigan H., 2008, *Sistem Pengawasan Terhadap Konstruksi Bangunan Menurut Hukum Perizinan*, Thesis. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Tri Endangsih, 2008, *Keselamatan Bangunan Pusat Perbelanjaan Terhadap Bahaya Kebakaran*, Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Triton, PB, 2005, *SPSS 13.0 Terapan, Riset Statistik Parametrik*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Zilhardi Idris, 2009, *Kajian Kepuasan Pengguna Angkutan Umum di DIY*, Dinamika Teknik Sipil, Fakultas Teknik UMS. Vol. 9, No. 2, Juli 2009 hal. 189-196.
- Zavadskas, E.K., Kaklauskas, A. Dan Vilutienė, T., (2009) "Multikriteria Analysis Maintenance Contractors" International Journal Management Property Strategic. Vilnius: Technika, 2009, Vol. 13, No. 4, hal 319-338.